

**REPRESENTASI SOSIAL-BUDAYA TENTANG KEPATUHAN  
PAJAK PADA ASN DAN NON ASN DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NURUL IZZAH  
105731119922**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,”*

**(QS. Al-Baqarah ayat 286)**

*“Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak.”*

**(Albert Einstein)**

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas Segala Rahmat, Dan Karunia Yang Allah SWT Berikan Sehingga Skripsi Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik. Alhamdulillah Rabbil'alam

Skripsi Ini Saya Persembahkan Sebagai Wujud Rasa Syukur, Kasih Sayang, Dan Terima Kasih Kepada Kedua Orang Saya Ibunda Nikmah Razak Dan Bapak Hasdi Hasan Yang Sangat Saya Cintai, Orang-Orang Yang Telah Mendukung Dan Membantu Saya, Serta Untuk Almamater Saya. Terima Kasih Untuk Selalu Berada Di Samping Saya Hingga Saat ini.

### PESAN

“Pendidikan Bukan Hanya Pergi Ke Sekolah Dan Mendapatkan Gelar. Tetapi Juga Soal Memperluas Pengetahuan Dan Menyerap Serta Mengaplikasikan Ilmu Kehidupan.”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Representasi Sosial-Budaya Tentang Kepatuhan Pajak  
Pada ASN dan Non ASN di Kota Makassar.

Nama Mahasiswa : Nurul Izzah

No. Stambuk/NIM : 105731119922

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia  
penguji skripsi strata 1 (S1) pada tanggal 31 Agustus 2024 di Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Mira, SE., M.Ak. Ak  
NIDN: 0903038803

Masrullah, SE., M.Ak  
NIDN: 0923089201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651057

Mira, SE., M.Ak. Ak  
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama Nurul Izzah, NIM : 105731119922, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/62201/091004/2024, Tanggal 27 Safar 1446H / 31 Agustus 2024M, sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Safar 1446 H  
01 September 2024 M

**PANITIA UJIAN**

- |                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| 1 Pengawas Umum | : Dr. Ir. H. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP<br>(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2 Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3 Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC<br>(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  | (.....) |
| 4 Penguji       | : 1. Mira, SE., M.Ak. Ak   | (.....) |
|                 | 2. Abdul Salam, SE., M.Si., Ak, CA. CSP                                | (.....) |
|                 | 3. Masrullah, SE., M.Ak  | (.....) |
|                 | 4. Endang Winarsih, SE., M.Ak  | (.....) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Izzah

No. Stambuk/NIM : 105731119922

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Representasi Sosial-Budaya Tentang Kepatuhan Pajak  
Pada ASN dan Non ASN di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 01 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Nurul Izzah**

**NIM : 105731119922**

Diketahui Oleh :

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Ketua Program Studi Akuntansi**

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
**NBM : 651057**

**Mira, SE., M.Ak. Ak**  
**NBM : 1286 844**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzah  
NIM : 105731119922  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Representasi Sosial-Budaya Tentang Kepatuhan Pajak Pada ASN dan Non ASN di Kota Makassar.**

Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 01 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Nurul Izzah**  
NIM : 105731119922

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah, dan kenikmatan yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Tugas Akhir Skripsi yang penulis buat ini memiliki tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terutama dan teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi semangat, dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada orang-orang terspesial dalam hidup penulis yaitu Ibunda Nikmah Razak atas kasih sayangnya yang besar diberikan kepada penulis, Ayahanda Hasdi Hasan atas semua jasa dan senantiasa menjaga, melindungi, dan mengajarkan penulis berbagai hal dengan segenap jiwa dan raganya. Dan juga kepada saudara-saudara penulis yang tercinta Izzul Islam dan Aisyah Fadhilah, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua bantuan yang diberikan hingga saat ini di akhir studi penulis. Semoga apa

yang telah diberikan kepada penulis bisa menjadi amal jariah dan menjadi cahaya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari penyusunan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Begitu pula rasa terima kasih banyak penulis ucapkan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Eknomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Pembimbing 1 yang telah banyak memberi dukungan dalam penyusunan Skripsi ini dan telah membantu penulis dengan banyak memberi arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Masrullah, SE., M.Ak selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing 2 yang telah banyak memberi arahan dan saran kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini dan telah bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis menempuh studinya.
5. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis selama masa akademik penulis. Beserta para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Terima kasih kepada teman-teman dari DIII Perpajakan Angkatan 2019 dan teman-teman dari prodi Akuntansi yang telah berjuang bersama-sama dan semua yang terlibat dalam perjalanan hidup penulis hingga sampai pada tahap ini.
7. Makasih buat Gemini Fourth yang sudah menemani penulis selama masa studi dengan kerandoman, series/event, dan kelucuan, serta kebucinan kalian yang membuat penulis semangat untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik, namun penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, dan koreksi yang diberi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima sebagai pembelajaran guna sebagai penyempurnaan Skripsi ini.

*Billahi Fisabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Penulis

## ABSTRAK

**NURUL IZZAH, TAHUN 2024. Representasi Sosial-Budaya Tentang Kepatuhan Pajak Pada ASN dan Non ASN di Kota Makassar**, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Mira dan Pembimbing 2 Masrullah.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah representasi sosial-budaya wajib pajak dalam hal ini ialah sikap, kepercayaan, dan norma sosial mereka berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan di kota makassar yang difokuskan khusus untuk wajib pajak dengan KTP Makassar dan memiliki penghasilan serta terdaftar sebagai wajib pajak dan berstatus ASN dan Non ASN di Kota Makassar. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak di kota makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh sikap, kepercayaan, dan norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.

**Kata Kunci : Representasi, Sosial-Budaya, Kepatuhan pajak, ASN dan Non ASN**



## **ABSTRACT**

**NURUL IZZAH, 2024. *Socio-Cultural Representation Regarding Tax Compliance on State Civil Servants and Non-State Civil Servants in The City of Makassar*, Thesis, Faculty of Economic and Business Department of Accountancy Muhammadiyah University of Makassar. Guided by supervisor 1 Mira and supervisor 2 Masrullah.**

*The aim of this research is to find out whether the socio-cultural representation of taxpayers, in this case their attitudes, beliefs and social norms, influences tax compliance or not. This research was conducted in the city of Makassar which focused specifically on taxpayers with Makassar IDs and had income and were registered as taxpayers and had status as state civil servants and non-state civil servants in Makassar City. The technique in this research uses quantitative techniques. The sample in this study was 100 taxpayers in the city of Makassar. The results of this research show that there is an influence of taxpayers' attitudes, beliefs and social norms on tax compliance in the state civil servants and non-state civil servants groups.*

**Keywords : Representation, Socio-Cultural, Tax Compliance, State Civil Servants and Non-State Civil Servants**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN TEORI .....	9
A. Landasan Teori .....	9
1. <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	9
2. Representasi dan Perpajakan .....	10
a. Pengertian Pajak .....	14
b. Manfaat Pajak .....	16
c. Fungsi Pajak .....	17
d. Sistem Pemungutan Pajak .....	19
e. Objek Pajak .....	20
f. Subjek Pajak .....	21
g. Wajib Pajak .....	22
3. Representasi Sosial-Budaya .....	23
4. ASN dan Non ASN .....	27
5. Kepatuhan Pajak .....	32
a. Pengertian Kepatuhan Pajak .....	32
b. Kriteria Kepatuhan Pajak .....	33
6. Kasadaran Wajib Pajak .....	34
a. Faktor Kasadaran Wajib Pajak .....	34
b. Pentingnya Kasadaran Wajib Pajak .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pikir .....	41
D. Hipotesis .....	41
BAB III. METODE PENELITIAN .....	45

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
E. Metode Analisis Data.....	47
F. Uji Asumsi Klasik .....	48
G. Analisis Regresi Berganda.....	49
H. Uji Hipotesis.....	49
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar .....	51
1. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	51
2. Aspek Kependudukan.....	53
B. Kepadatan Jumlah Penduduk.....	54
C. Deskriptif Responden.....	55
D. Deskripsi Variabel Penelitian.....	58
E. Hasil Analisis Data .....	61
1. Uji Validitas .....	61
2. Uji Reliabilitas .....	63
F. Uji Asumsi Klasik .....	64
1. Uji Normalitas.....	64
2. Uji Multikolinearitas .....	65
3. Uji Heteroskedastisitas.....	66
G. Analisis Regresi Berganda.....	67
H. Uji Hipotesis.....	68
1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	68
2. Uji Statistik t (Parsial).....	69
I. Pembahasan .....	71
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
C. Keterbatasan Penelitian.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri .....	21
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar .....	52
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar .....	53
Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar .....	54
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	56
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Usia .....	57
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Pendidikan .....	57
Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	58
Tabel 4.8 Tanggapan Responden terhadap Sikap Wajib Pajak (X1) .....	59
Tabel 4.9 Tanggapan Responden terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (X2) .....	60
Tabel 4.10 Tanggapan Responden terhadap Norma Sosial (X3) .....	60
Tabel 4.11 Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Pajak (Y) .....	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas .....	62
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas .....	63
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas .....	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4.16 Uji Regresi Linier Berganda .....	67
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69
Tabel 4.19 Hasil Uji t (Parsial) .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4.1 Scatterplot.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	79
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....	98
Lampiran 3 Hasil Plagiasi .....	101
Lampiran 4 Dokumentasi .....	108



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program dan proyek penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan bagi masyarakat. Melalui sistem pajak yang progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan, pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Pajak yang adil dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan keadilan sosial.

PPH Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu dari pekerjaan atau jasa. Pajak ini dikenakan pada pegawai, pekerja lepas, atau orang yang menerima honorarium. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak OP.

Berbagai kajian juga dibahas salah satunya ialah mengenai kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan atau kesesuaian para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat

kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan suatu negara dan memastikan penerimaan pajak yang memadai bagi pemerintah.

Ada berbagai penelitian internasional terdahulu yang mengkaji perilaku kepatuhan pajak tetapi dari perspektif psikologi dan ilmu sosial dan cenderung mengasosiasikan pajak dengan konsep persepsi, salah satunya ialah (Burton, Karlinsky, & Blanthorne, 2005).

Ada beberapa riset yang terkait dengan penelitian representasi sosial tentang pajak telah ada, namun riset-riset tersebut berbasis data dari negara barat seperti Jerman, Austria, Inggris, Polandia, dan Australia. Sedangkan penelitian serupa dalam konteks budaya Indonesia masih sangat jarang ditemukan. Disamping itu, ditemukan bahwa tema-tema negatif lebih direpresentasikan ketika orang berpikir tentang pajak. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN memiliki kemampuan literasi digital lebih tinggi dan hidup di area perkotaan. Penulis berasumsi bahwa representasi positif akan lebih dominan pada populasi ASN dan non ASN khususnya di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi representasi sosial pajak pada kelompok pekerja ASN. Pendekatan representasi sosial menjadi penting karena representasi sosial menjadi landasan terbentuknya penilaian, pemaknaan, persepsi keadilan, keyakinan, kesediaan serta kemampuan untuk mematuhi aturan perpajakan.

Representasi sosial dan budaya memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk persepsi, stereotipe, dan konstruksi identitas individu dan kelompok dalam masyarakat. Representasi yang akurat, beragam, dan

inklusif penting dalam mendorong pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok sosial dan budaya, serta mempromosikan kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pembentukan representasi sosial budaya merujuk pada proses di mana gagasan, pandangan, nilai-nilai, norma, stereotipe, dan identitas kelompok atau masyarakat tertentu dibentuk, terbentuk, dan dikonstruksi dalam pikiran individu dan dalam budaya secara luas. Ini melibatkan interaksi kompleks antara individu, media, institusi, dan konteks sosial yang lebih luas.

Pembentukan representasi sosial budaya adalah proses yang kompleks dan beragam, terbentuk oleh faktor-faktor individual dan kontekstual yang saling berinteraksi. Penting untuk diingat bahwa representasi sosial dan budaya bisa jadi terkait dengan stereotipe, bias, atau kesalahan persepsi, sehingga penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, inklusif, dan kritis tentang kelompok dan masyarakat yang berbeda. Dalam perspektif sosiologi, representasi sosial budaya mengacu pada cara di mana gagasan, nilai-nilai, norma, dan identitas sosial dan budaya diwujudkan dan dikomunikasikan dalam masyarakat. Representasi sosial budaya adalah hasil interaksi sosial yang melibatkan individu, kelompok, dan institusi dalam proses sosial yang lebih luas. Dalam sosiologi, representasi sosial budaya dipelajari untuk memahami bagaimana masyarakat mengkonstruksi makna, norma, dan identitas sosial dalam interaksi sosial mereka. Penelitian tentang representasi sosial budaya dapat mengungkapkan konflik, ketimpangan, atau dominasi sosial, serta melibatkan analisis kritis terhadap norma dan nilai-nilai yang mendasari representasi tersebut.

Di Indonesia, studi pajak dalam kerangka representasi sosial masih sangat jarang dilakukan. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada artikel publikasi pada topik representasi sosial dalam konteks perpajakan. Beberapa penelitian yang ada lebih berfokus pada penggunaan istilah persepsi yang dikaitkan dengan perpajakan, diantaranya persepsi korupsi dengan kepatuhan pajak (Aryati, 2012; Rosid dkk., 2017). Namun demikian dari hasil penelitian Ika Rahma Susilawati dan Rahmat Hidayat menunjukkan bahwa ada empat tema utama representasi sosial tentang pajak di Indonesia yaitu tema positif, negatif, kewajiban dan netral-teknikal.

Beberapa kelompok demografis spesifik menunjukkan kecenderungan dominansi representasi pajak yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kelompok pekerja bebas dan entrepreneur menunjukkan representasi negatif paling tinggi dibandingkan kelompok pekerjaan lain. Selain itu, kelompok pekerjaan seperti pekerja sosial dan mahasiswa memiliki representasi yang lebih dominan pada tema netral. Sebaliknya, kelompok pekerjaan ASN memiliki representasi dengan frekuensi tertinggi pada tema positif. Namun demikian, hasil studi representasi pajak yang kami lakukan pada masyarakat sub-urban dan pedesaan menunjukkan hasil yang berbeda dimana representasi negatif lebih dominan muncul pada golongan pekerja ASN (Susilawati & Hidayat, 2019a, 2019b). Dengan demikian, masih terdapat inkonsistensi hasil temuan dari demografi ASN itu sendiri (Susilawati & Hidayat, 2019)

Indonesia sebagai negeri hukum Dimana pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang yang sah dengan system pemungutan pajak yaitu *Self assessment system* (Mardiasmo, 2019). *Self assessment system*

adalah sistem pemungutan pajak yang menitik beratkan kepercayaan dan aktifan wajib pajak secara penuh dan memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Resmi, 2019), sedangkan untuk Official Assessment system menitikberatkan pada fiskus untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. perubahan sistem pajak ini, diharapkan wajib pajak akan berpengaruh pada sikap dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak diharapkan akan memiliki kesadaran wajib pajak (tax consciousness), kejujuran wajib pajak, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (tax mindness), kedisiplinan wajib pajak (tax discipline) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Keputusan kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh keyakinan wajib Pajak akan norma atau nilai hidup yang wajib Pajak yakini. Norma sosial didefinisikan sebagai “aturan - aturan dan standar - standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan yang memandu dan atau membatasi perilaku sosial tanpa dipaksa oleh hukum” (Cialdini dan Trost 1998, h.152). Norma sosial ini akan memandu dan menjadi batasan bagi seseorang dari berperilaku, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak atau kepatuhan terhadap pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, diantaranya adalah sikap, kepercayaan dan norma sosial.

Sikap merupakan pernyataan maupun pertimbangan dari perspektif individu wajib pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan interaksi dengan mempertimbangkan asas manfaat dari objek (Salam, 2015). Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-

keyakinan Wajib Pajak tentang kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Keyakinan Wajib Pajak tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian Hanno dan Violette (1996) serta Bobek dan Hatfield (2003) menyatakan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian ernawati & Purnomosidhi (2021) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat untuk melakukan kepatuhan pajak.

Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ini terkait dengan bagaimana individu memandang kepercayaan mereka terhadap sistem pajak, pemerintah, dan aturan perpajakan secara umum. Dalam konteks kepatuhan pajak, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak dan pemerintah sangat penting. Pemerintah dan lembaga pajak perlu berusaha untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem pajak, serta memberikan informasi yang jelas dan terpercaya tentang penggunaan dana pajak. Ini dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Norma sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan pajak. Norma sosial mengacu pada aturan informal yang diterima oleh masyarakat tentang perilaku yang dianggap tepat atau tidak tepat dalam suatu situasi. Dalam konteks kepatuhan pajak, norma sosial mencakup

pandangan dan harapan masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Dengan memahami pengaruh norma sosial, pemerintah dan lembaga pajak dapat merancang strategi untuk memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak. Ini bisa meliputi kampanye pendidikan publik, kerja sama dengan kelompok masyarakat, dan upaya untuk membangun kepercayaan dan integritas dalam sistem perpajakan.

Dari penjelasan di atas, menekankan bahwa pentingnya memahami representasi sosial budaya sebagai upaya memahami sikap dan perilaku lebih mendalam untuk membantu perilaku manusia dalam konteks sosial masyarakat kurang mendapat perhatian dan inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Representasi Sosial-Budaya Tentang Kepatuhan Pajak Pada ASN dan Non ASN di Kota Makassar”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi representasi sosial dan budaya tentang pajak pada ASN dan non ASN di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sikap mempengaruhi kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN?
2. Apakah kepercayaan mempengaruhi kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN ?
3. Apakah Norma Sosial mempengaruhi kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Sikap terhadap kepatuhan pajak pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Norma sosial terhadap kepatuhan pajak pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis  
Untuk pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terkhususnya tentang kepatuhan pajak.
2. Bagi Instansi  
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu masyarakat menyebarkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu mengenai Kepatuhan Pajak.
3. Bagi Akademisi  
Melalui penelitian ini, diharapkan bagi akademisi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan pajak baik dalam kelompok ASN dan Non ASN dan juga dapat digunakan sebagai referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Theory of Planned Behavior*

*Theory Of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada berbagai teori sikap seperti teori belajar, teori harapan nilai, teori-teori konsistensi serta teori atribusi. Teori perilaku yang direncanakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam psikologi, teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku.

*Theory Of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan. Sampai saat ini, teori ini banyak digunakan dalam bergam keilmuan yang membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan.

TPB merupakan teori yang cukup kuat dan sederhana dalam memprediksi dan atau menjelaskan perilaku. TPB adalah teori yang menjelaskan tentang intensi, yaitu seberapa keras individu mencoba dan seberapa besar usaha yang dikorbankan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pada dasarnya konsep dasar TPB adalah presiksi intensi yang apabila tidak ada masalah serius, maka akan terwujud dalam bentuk actual behavior.

Dalam *Theory Of Planned Behavior* yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* dinyatakan bahwa intensi bisa diprediksi dari tiga elemen pembentuk, yaitu sikap, norma subyektif dan control perilaku yang dirasakan. Control perilaku yang dipersepsikan adalah elemen terakhir yang ditemukan sebagai timbulnya intensi dan telah terbukti Attitudes (A) towards Behavior Subjective Norma (SN) towards Behavior Perceived Behavioral Control Intention (I) towards Behavior 20 dapat meningkatkan kemampuan prediksi dari Theory of Reasoned Action (TRA). Hal ini disebabkan karena selain sikap dan norma subyektif, perilaku individu juga dipicu oleh non-volitional control, yaitu perasaan individu tentang ada atau tidak adanya sumber daya dan kesempatan yang mendukung.

## **2. Representasi dan Perpajakan**

Representasi adalah proses atau cara menggambarkan atau menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang lain. Representasi dapat berupa gambar, kata-kata, simbol, grafik, atau bahkan tindakan fisik. Representasi digunakan untuk mengomunikasikan ide, konsep, atau informasi dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya.

Representasi memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti seni, matematika, sains, politik, dan budaya. Misalnya, dalam seni, representasi digunakan untuk menciptakan gambaran visual atau artistik dari objek nyata atau abstrak. Dalam matematika, representasi digunakan

untuk mewakili konsep dan hubungan matematis melalui simbol-simbol dan formula.

Penting untuk dicatat bahwa representasi tidak selalu sepenuhnya merefleksikan realitas atau objek yang direpresentasikan. Representasi adalah interpretasi atau abstraksi dari realitas, dan dapat tergantung pada perspektif, konteks, atau bahasa yang digunakan. Representasi dapat digunakan dalam berbagai konteks dan bidang, seperti seni, linguistik, matematika, ilmu komputer, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa aspek penting mengenai representasi:

- a. Abstraksi, representasi melibatkan pengabstrakan, yaitu penyederhanaan atau penyusutan informasi atau objek ke dalam simbol atau konsep yang lebih sederhana. Proses ini memungkinkan kita untuk menggambarkan atau memodelkan sesuatu secara lebih komprehensif atau mudah dipahami.
- b. Konvensi, representasi sering kali didasarkan pada konvensi atau aturan yang disepakati bersama dalam suatu komunitas atau disiplin. Misalnya, dalam matematika, simbol-simbol dan notasi matematis memiliki arti khusus yang diatur oleh konvensi tertentu.
- c. Interpretasi, representasi tidak hanya tentang menghasilkan simbol atau gambaran, tetapi juga melibatkan proses interpretasi oleh penerima pesan atau simbol tersebut. Setiap individu dapat memahami atau menginterpretasikan representasi dengan cara yang berbeda, tergantung pada pengetahuan, konteks, atau pengalaman mereka.
- d. Konteks, representasi selalu bergantung pada konteks di mana

mereka digunakan. Artinya, makna atau interpretasi dari suatu representasi dapat berubah tergantung pada konteks di mana mereka ditempatkan. Misalnya, simbol yang digunakan dalam matematika memiliki makna yang berbeda jika digunakan dalam konteks fisika atau ekonomi.

e. Medium, representasi dapat disampaikan melalui berbagai media atau saluran komunikasi, termasuk bahasa lisan atau tulisan, gambar, grafik, simbol matematis, diagram, dan teknologi digital. Setiap medium memiliki kekuatan dan keterbatasan dalam menyampaikan informasi atau konsep tertentu.

f. Tujuan, representasi memiliki tujuan atau maksud tertentu. Misalnya, dalam ilmu pengetahuan, representasi digunakan untuk menggambarkan fenomena alamiah dan memberikan pemahaman tentang dunia yang kompleks. Dalam politik atau media, representasi dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi atau opini publik.

Representasi memainkan peran penting dalam cara kita berkomunikasi, memahami dunia, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ilmiah, representasi yang baik dan akurat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat dan validitas temuan atau informasi yang disampaikan.

Dalam konteks ekonomi, representasi merujuk pada cara-cara yang digunakan untuk menggambarkan dan mewakili konsep, fenomena, atau data ekonomi. Representasi dalam ekonomi dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada tujuan dan konteks penggunaannya. Berikut ini

adalah beberapa contoh representasi dalam ekonomi:

- a. Grafik dan Diagram, grafik dan diagram sering digunakan untuk merepresentasikan data ekonomi, seperti hubungan antara variabel ekonomi, perubahan dalam waktu, atau perbandingan antara kelompok atau negara yang berbeda. Contohnya adalah grafik garis untuk menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi, diagram batang untuk membandingkan tingkat pengangguran antarwilayah, atau diagram lingkaran untuk menunjukkan komposisi sektor ekonomi.
- b. Model Ekonomi, model ekonomi adalah representasi matematis atau konseptual dari hubungan ekonomi. Model-model tersebut menggunakan variabel, persamaan, dan asumsi untuk menggambarkan cara berfungsinya sistem ekonomi. Contohnya adalah model permintaan dan penawaran yang menggambarkan interaksi antara harga dan kuantitas barang, atau model pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan jangka panjang.
- c. Indeks dan Angka, indeks ekonomi seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Pembelian Manajer (PMI) digunakan untuk merepresentasikan perubahan harga atau aktivitas ekonomi dalam suatu periode waktu tertentu. Angka-angka ini memberikan gambaran singkat tentang keadaan ekonomi secara keseluruhan atau di sektor-sektor tertentu.

d. Teori dan Konsep Ekonomi, teori dan konsep ekonomi adalah representasi abstrak dari hubungan dan prinsip ekonomi. Misalnya, hukum penawaran dan permintaan adalah representasi teoritis tentang bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan dalam pasar. Konsep-konsep seperti produktivitas, inflasi, atau modal manusia adalah representasi konseptual dari fenomena ekonomi yang kompleks.

e. Laporan dan Analisis Ekonomi, laporan ekonomi, seperti laporan keuangan perusahaan atau laporan kebijakan pemerintah, digunakan untuk merepresentasikan kinerja ekonomi, hasil keuangan, atau kebijakan ekonomi tertentu. Analisis ekonomi, seperti analisis regresi atau analisis cost-benefit, digunakan untuk menganalisis dan merepresentasikan dampak ekonomi dari suatu kebijakan atau peristiwa.

Penting untuk diketahui bahwa representasi dalam ekonomi dapat bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh perspektif atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan metode yang digunakan dalam representasi ekonomi serta melihat lebih jauh dari representasi tunggal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ekonomi yang ada.

#### **a. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk membiayai kegiatan publik dan memenuhi kebutuhan fiskal negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur, program sosial, pertahanan, pendidikan, dan sejumlah fungsi pemerintahan lainnya.

Pajak memiliki beberapa tujuan, antara lain :

- a. Membantu pemerintah membiayai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan fiskal negara.
- b. Mengatur distribusi pendapatan dengan memberikan kontribusi yang lebih besar dari individu atau perusahaan dengan penghasilan lebih tinggi.
- c. Mengendalikan atau mengatur perilaku ekonomi dengan memberlakukan insentif atau hukuman fiskal.
- d. Memperbaiki alokasi sumber daya dengan mengurangi konsumsi atas barang tertentu atau mendukung sektor tertentu melalui insentif pajak

## **b. Manfaat Pajak**

Pajak merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan publik dan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian serta kehidupan masyarakat. Semua dana dari pembayaran pajak akan digunakan oleh negara dan diperuntukkan bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Peraturan perpajakan dapat bervariasi di setiap negara, oleh karena itu penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami peraturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku di wilayah mereka. Pajak memiliki banyak manfaat bagi negara dan Masyarakat, berikut adalah beberapa manfaat utama pajak :

- 1) Pendapatan Negara : Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai beberapa program dan proyek Pembangunan, seperti infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan.
- 2) Redistribusi Pendapatan : Pajak membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu ke yang kurang mampu melalui program bantuan social.
- 3) Stabilisasi Ekonomi : Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan tingkat pajak untuk mempengaruhi Tingkat konsumsi dan investasi.

- 4) Pelayanan Publik : Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan public yang penting, seperti keamanan, penegakan huku, dan pelayanan Kesehatan.
- 5) Pengembangan Infrastruktur : Dana pajak digunakan untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- 6) Pengendalian Polusi : Pajak lingkungan, seperti pajak karbon, dapat digunakan untuk mengurangi polusi dan mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.
- 7) Dukungan Industri Lokal : Melalui insentif pajak, pemerintah dapat mendukung industri lokal dan mendorong investasi domestik.

### **c. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak perekonomian dan Masyarakat mencakup beberapa aspek utama. Berikut adalah fungsi-fungsi utama pajak :

#### **1) Fungsi Anggaran (Budgeter)**

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

#### **2) Fungsi Mengatur (Regulasi)**

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengukur atau mengontrol kegiatan ekonomi dan sosial. Contohnya, pajak dapat

digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu (seperti rokok dan alcohol) atau untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu melalui pemberian insentif pajak.

### 3) Fungsi Distribusi (Redistribusi Pendapatan)

Melalui sistem pajak progresif, di mana tingkat pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, pajak membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Pajak dari golongan berpenghasilan tinggi dapat dialokasikan untuk program-program bantuan sosial bagi golongan berpenghasilan rendah.

### 4) Fungsi Stabilisasi

Fungsi dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selama periode inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, selama resesi, pemerintah dapat menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli Masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

### 5) Fungsi Alokasi

Pajak berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi agar digunakan lebih efektif dan efisien. Pemerintah dapat mengalokasikan dana pajak untuk sektor-sektor yang membutuhkan, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur, untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

#### d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi beberapa metode, tergantung pada jenis pajak dan kebijakan pemerintah suatu negara. Berikut adalah beberapa sistem pemungutan pajak yang umum :

1) *Self-Assessment System* (Sistem Penilaian Sendiri)

Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak

yang terutang. Pemerintah kemudian melakukan pengawasan dan audit

untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH) di banyak negara menggunakan sistem ini.

2) *Official Assessment System* (Sistem Penilaian Resmi)

Pemerintah atau otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. Wajib pajak menerima surat ketetapan pajak yang harus dibayarkan.

3) *Withholding System* (Sistem Pematangan)

Pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga (seperti pemberi kerja) dari pendapatan wajib pajak sebelum pendapatan tersebut diterima. Contohnya, pajak penghasilan karyawan yang dipotong langsung dari gaji oleh pemberi kerja.

#### e. Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Objek pajak adalah suatu dasar atau alasan yang menyebabkan subjek pajak membayar atau membayar sebagian harta harta kekayaannya untuk negara (Setiawan, 2015). Setiap jenis pajak memiliki objek pajak yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh objek untuk berbagai jenis pajak :

1) Pajak Penghasilan (PPH)

Objek pajak ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, selama satu tahun pajak.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak ini adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang ada di wilayah Indonesia, seperti tanah, perairan dan laut, serta konstruksi teknik yang ditanam secara tetap di dalam tanah dan/atau perairan.

4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Objek pajak ini adalah penyerahan barang mewah oleh produsen atau impor barang mewah oleh importir.

### 5) Pajak Daerah

Objek pajak ini dibagi atas tiga yaitu pajak kendaraan bermotor, seperti kendaraan bermotor, pajak hiburan seperti bioskop dan konser, serta pajak hotel seperti hotel, penginapan, wisma, dan akomodasi lainnya.

### f. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum dikenakan kewajiban membayar pajak. Subjek pajak dapat berupa individu maupun entitas tertentu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan jenis pajak yang berlaku. Berdasarkan letak geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1**

#### **Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri**

<b>NO</b>	<b>Subjek Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Subjek Pajak Luar Negeri</b>
1	Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima di Indonesia maupun dari luar Indonesia.	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
<b>NO</b>	<b>Subjek Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Subjek Pajak Luar Negeri</b>
2	Dikenakan pajak dari penghasilan neto	Dikenakan pajak dari penghasilan bruto

3	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17).	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26).
4	Wajib melaporkan SPT	Tidak wajib melaporkan SPT

(Sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK. Perpajakan Edisi Terbaru 2018)

### g. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu atau badan hukum yang dikenakan kewajiban membayar pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

#### 1) Hak Wajib Pajak

- a) Mendapatkan pelayanan pajak : Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari otoritas pajak.
- b) Mengajukan keberatan dan banding : Jika tidak setuju dengan ketentuan pajak, wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding.
- c) Mendapatkan restitusi : Wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian pajak yang telah dibayarkan jika terjadi kelebihan pembayaran pajak.

#### 2) Kewajiban Wajib Pajak

- a) Mendaftar dan mendapatkan NPWP : Wajib pajak harus mendaftar ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP sebagai identitas resmi dalam administrasi perpajakan.

- b) Melaporkan penghasilan dan pajak terutang : Wajib pajak harus melaporkan penghasilan dan menghitung pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau SPT Masa.
- c) Membayar pajak yang terutang : Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Mematuhi peraturan perpajakan : Wajib pajak harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pembukuan, pencatatan, dan pelaporan.

### **3. Representasi Sosial-Budaya**

Representasi sosial budaya merujuk pada cara-cara di mana gagasan, norma, nilai, atau identitas sosial budaya direpresentasikan atau diungkapkan dalam masyarakat. Representasi sosial budaya mencerminkan cara orang memahami dan mengartikan dunia di sekitar mereka, serta bagaimana mereka membangun dan menyampaikan makna tentang diri mereka sendiri, kelompok, dan budaya mereka.

Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai representasi sosial budaya:

- a. Media dan Budaya Populer, representasi sosial budaya sering kali tercermin dalam media dan budaya populer seperti film, televisi, musik, iklan, dan media sosial. Media ini mempengaruhi cara kita melihat dan memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan

budaya, termasuk gender, ras, etnisitas, kelas sosial, agama, dan banyak lagi.

- b. Stereotipe dan Pencitraan, representasi sosial budaya dapat melibatkan penggunaan stereotipe, yaitu pandangan yang sederhana dan generalisasi tentang kelompok-kelompok sosial tertentu. Stereotipe dapat memengaruhi persepsi dan citra yang terbentuk tentang kelompok atau individu dalam masyarakat.
- c. Kekuasaan dan Representasi, representasi sosial budaya juga dapat mencerminkan hubungan kekuasaan dan ketimpangan dalam masyarakat. Beberapa kelompok atau identitas sosial dapat diwakili secara dominan atau terpinggirkan dalam media dan representasi publik lainnya, yang dapat mempengaruhi cara mereka dilihat dan dihargai oleh masyarakat secara luas.
- d. Identitas dan Representasi, representasi sosial budaya memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu dan kelompok. Cara kita direpresentasikan dalam konteks sosial budaya dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri, serta bagaimana orang lain melihat dan memahami kita.
- e. Dekonstruksi Representasi, kajian representasi sosial budaya juga melibatkan dekonstruksi atau kritis terhadap cara-cara representasi tertentu dibentuk dan digunakan. Ini melibatkan pengungkapan bagaimana representasi dapat mencerminkan kepentingan, konstruksi kuasa, atau bias tertentu, serta melibatkan kajian mengenai alternatif representasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

- f. Budaya Partisipatif dan Representasi Alternatif, dalam era digital dan media sosial, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam produksi representasi sosial budaya. Masyarakat dapat menciptakan dan menyebarkan narasi alternatif yang melibatkan kelompok atau identitas yang terpinggirkan, serta melibatkan dialog dan pertukaran perspektif yang lebih luas.

Penting untuk diketahui bahwa representasi sosial budaya bukanlah cerminan langsung dari kenyataan, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pengenalan terhadap representasi sosial budaya yang beragam dan kritis dapat membantu kita memahami dinamika dan kompleksitas masyarakat serta membantu mempromosikan pemahaman, toleransi, dan keadilan sosial.

Representasi sosial budaya tentang pajak mencerminkan cara masyarakat memahami dan menyampaikan makna tentang pajak dalam konteks sosial dan budaya mereka. Representasi ini dapat bervariasi dalam berbagai cara tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai, norma, dan konteks sosial yang ada.

Berikut ini adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan representasi sosial budaya tentang pajak:

- a. Citra dan Pendapat Publik, representasi sosial budaya dapat mencerminkan cara masyarakat melihat pajak dan institusi perpajakan. Beberapa masyarakat mungkin menganggap pajak sebagai beban yang tidak diinginkan, sementara yang lain mungkin

melihatnya sebagai kewajiban sosial yang penting untuk membiayai layanan publik.

- b. Persepsi tentang Keadilan Pajak, representasi sosial budaya dapat mencerminkan persepsi masyarakat tentang keadilan dalam sistem pajak. Beberapa masyarakat mungkin percaya bahwa sistem pajak harus adil dan meminta kontribusi yang lebih besar dari mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi, sementara yang lain mungkin merasa bahwa pajak harus lebih proporsional atau bahkan regresif.
- c. Stereotipe tentang Pemotongan Pajak, representasi sosial budaya juga dapat mencerminkan stereotipe atau pandangan umum tentang kebijakan pemotongan pajak. Beberapa masyarakat mungkin melihatnya sebagai upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberikan insentif bagi pengusaha, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai kebijakan yang menguntungkan kelas atas atau perusahaan besar.
- d. Representasi Media, media berperan penting dalam membentuk representasi sosial budaya tentang pajak. Media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat melalui laporan berita, program televisi, artikel opini, atau iklan yang berkaitan dengan pajak. Representasi dalam media dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pengaruh Budaya dan Nilai-nilai, representasi sosial budaya tentang pajak juga dapat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai

yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kesetaraan, solidaritas sosial, atau kebebasan individual dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang pajak dan sistem perpajakan.

Penting untuk diketahui bahwa representasi sosial budaya tentang

pajak tidak selalu mencerminkan realitas atau kebijakan pajak yang sebenarnya. Representasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan kritis dalam memahami dan menafsirkan representasi sosial budaya tentang pajak, serta menggali informasi yang lebih mendalam tentang kebijakan dan efek pajak dari sumber yang dapat dipercayai.

#### **4. ASN dan Non ASN**

ASN merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara, sementara Non ASN merujuk pada individu yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua istilah tersebut:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah merujuk pada individu yang dipekerjakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah sebagai pegawai negeri. Mereka merupakan bagian dari struktur administrasi pemerintahan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. ASN biasanya diatur oleh undang-undang dan

peraturan pemerintah yang mengatur status, hak, dan kewajiban mereka sebagai pegawai negeri.

- b. Non ASN ialah merujuk pada individu yang bekerja di sektor non-pemerintah atau non-aparatur sipil negara. Mereka dapat menjadi pekerja atau pegawai di sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), atau lembaga lain di luar struktur pemerintah. Non ASN tidak memiliki status pegawai negeri dan tidak terikat pada undang-undang dan peraturan yang mengatur ASN.

Perbedaan antara ASN dan Non ASN meliputi status kepegawaian, hak dan kewajiban, serta pengaturan terkait karir dan kebijakan yang berlaku bagi keduanya. ASN memiliki status pegawai negeri dengan hak-hak dan perlindungan yang diatur secara khusus, sementara Non ASN tidak memiliki status tersebut dan tunduk pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi atau organisasi tempat mereka bekerja.

Kedua kelompok ini memiliki peran yang penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan perekonomian secara keseluruhan. ASN biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, melaksanakan kebijakan, dan menjaga kestabilan administrasi pemerintahan. Sementara itu, Non ASN juga berperan dalam sektor swasta, organisasi non-pemerintah, atau sektor lainnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Berikut adalah perbedaan antara ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Non ASN:

a. Status Kepegawaian:

- 1) ASN memiliki status sebagai pegawai negeri yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Mereka dipekerjakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah.
- 2) Non ASN tidak memiliki status pegawai negeri dan biasanya bekerja di sektor non-pemerintah seperti swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), atau sektor lain di luar struktur pemerintah.

b. Regulasi dan Kewajiban:

- 1) ASN tunduk pada undang-undang dan peraturan yang mengatur ASN, seperti UU ASN. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara khusus, termasuk dalam hal cuti, pensiun, dan perlindungan hukum sebagai pegawai negeri.
- 2) Non ASN tunduk pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi atau organisasi tempat mereka bekerja. Mereka tidak diatur oleh undang-undang yang secara khusus mengatur ASN.

c. Karir dan Mobilitas:

- 1) ASN memiliki jalur karir dan kenaikan pangkat yang diatur dalam kebijakan pemerintah. Mereka dapat mengikuti tes, pelatihan, dan promosi untuk naik pangkat atau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan.
- 2) Non ASN mungkin memiliki jalur karir yang berbeda tergantung pada sektor atau organisasi tempat mereka bekerja. Mereka dapat mengembangkan karir mereka melalui pengalaman kerja,

keterampilan, dan pencapaian yang relevan dalam pekerjaan mereka.

d. Gaji dan Kompensasi:

- 1) ASN biasanya mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pegawai negeri. Gaji ASN biasanya ditetapkan dalam skala gaji berdasarkan pangkat dan golongan.
- 2) Kompensasi Non ASN dapat berbeda-beda tergantung pada sektor dan organisasi tempat mereka bekerja. Kompensasi mereka mungkin ditentukan melalui kesepakatan individual atau kebijakan organisasi.

e. Keterikatan dengan Pemerintah:

- 1) ASN merupakan bagian dari struktur administrasi pemerintahan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
- 2) Non ASN bekerja di sektor non-pemerintah dan tidak memiliki keterikatan langsung dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kebijakan.

Penting untuk diketahui bahwa perbedaan ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan konteks di setiap negara atau yurisdiksi tertentu.

Keterkaitan ASN dan Non ASN dalam perpajakan terkait dengan status kepegawaian mereka dan implikasi perpajakan yang terkait. Berikut adalah beberapa poin terkait keterkaitan keduanya dalam konteks perpajakan:

a. Pemotongan Pajak:

- 1) Pemerintah biasanya melakukan pemotongan pajak langsung dari gaji ASN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan ini dilakukan secara otomatis oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penggajian.
- 2) Bagi Non ASN, pemotongan pajak biasanya tidak dilakukan secara otomatis oleh pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk membayar pajak secara mandiri dengan mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Pengajuan SPT Pajak:

- 1) ASN juga diwajibkan untuk mengajukan SPT Pajak Penghasilan (PPH) setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama jika memiliki penghasilan selain dari gaji yang diterima dari pemerintah.
- 2) Non ASN harus mengajukan SPT Pajak Penghasilan (PPH) setiap tahunnya, mengungkapkan penghasilan mereka dari sumber-sumber yang berbeda, seperti gaji dari sektor swasta, usaha sendiri, investasi, atau sumber-sumber lainnya.

c. Kepatuhan Perpajakan:

- 1) Karena pemotongan pajak dilakukan secara otomatis oleh pemerintah, ASN memiliki keterikatan perpajakan yang lebih langsung dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Non ASN memiliki tanggung jawab yang lebih mandiri dalam

memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk membayar pajak secara tepat waktu dan mengajukan SPT Pajak sesuai jadwal yang ditentukan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pemotongan dan pelaporan pajak antara ASN dan Non ASN, keduanya memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negara mereka. Kedua kelompok tersebut diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang berkontribusi pada pembiayaan negara melalui pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **5. Kepatuhan Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak adalah konsep yang mengacu pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum pajak serta untuk melaporkan pendapatan, aset, dan transaksi keuangan lainnya kepada otoritas pajak.

Kepatuhan pajak adalah kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Ini mencakup pembayaran pajak tepat waktu, pelaporan yang akurat, dan menjalankan kewajiban pajak lainnya sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

Kepatuhan pajak juga melibatkan kesadaran dan pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak yang dimiliki oleh individu atau entitas tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak yang berlaku, serta cara-cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Kepatuhan pajak melibatkan menghindari pelanggaran pajak, seperti penggelapan pajak, penipuan pajak, atau tindakan lain yang melanggar hukum perpajakan. Hal ini termasuk pematuhan terhadap semua ketentuan hukum pajak yang berlaku, serta penyesuaian diri terhadap perubahan hukum perpajakan yang terjadi.

#### **b. Kriteria Kepatuhan Pajak**

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Nuraeni (2018) adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang

terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

## **6. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kepatuhan individu atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran ini melibatkan aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan yang mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan.

### **a. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak**

- 1) Pengetahuan Perpajakan
  - a) Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan.
  - b) Akses terhadap informasi perpajakan melalui media, seminar, dan pendidikan.
- 2) Sikap Terhadap Pajak
  - a) Persepsi tentang keadilan dan manfaat pajak.
  - b) Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak untuk kesejahteraan publik.

3) Kepatuhan Sosial dan Budaya

- a) Pengaruh norma sosial dan budaya di masyarakat mengenai kepatuhan pajak.
- b) Pengaruh lingkungan sekitar, seperti teman, keluarga, dan komunitas.

4) Sistem dan Pelayanan Perpajakan

- a) Kemudahan akses dan penggunaan sistem perpajakan.
- b) Kualitas pelayanan dan responsivitas dari otoritas pajak.

5) Penegakan Hukum

- a) Adanya sanksi dan Tindakan tegas terhadap pelanggaran perpajakan.
- b) Transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum pajak.

**b. Pentingnya Kesadaran Wajib Pajak**

- 1) Meningkatkan Penerimaan Negara, dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, diharapkan akan ada peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang patuh, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.
- 2) Mendorong Pembangunan, pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya.
- 3) Menjaga Keadilan Sosial, dengan membayar pajak, wajib pajak turut serta dalam upaya pemerataan ekonomi dan keadilan

sosial, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

- 4) Meningkatkan Kepercayaan Publik, kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintah.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI DAN TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Ika Rahma Susilawati & Rahmat Hidayat (2019)	Representasi Sosial Tentang Pajak Pada Aparatur Sipil Negara.	Representasi sosial tentang pajak pada ASN didominasi tema positif yang didalamnya terkandung unsur penilaian terhadap nilai manfaat, tujuan bersama, dan rasa kewajiban moral sebagai hubungan timbal balik hak dan kewajiban yang melekat dari tuntutan peran pekerjaannya sebagai ASN. Kewajiban dirasakan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan dipaksakan namun dengan kesadaran

			bahwa kewajiban tersebut memiliki nilai penting dan positif bagi keutuhan, persatuan dan kehidupan bermasyarakat serta bernegara.
2	Zahra Durah Nabila & Dra. Isroah, M.Si (2019)	Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kewajiban moral dan Lingkungan sosial secara Bersama sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha (WP-OP Pengusaha) di KPP Pratama Bantul.
3	Lisa Amelia Herman, Aminar Sutra Dewi, & Mike Kusuma Dewi (2019)	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan, Dan Norma Sosial.	Deterrence Factor, berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4	Popi Fauziati, Nailal Husna, dan Yetty Morelent (2022)	Dampak Insentif Perpajakan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang.	Simpulan dari penelitian ini adalah pengaruh variabel insentif perpajakan dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 40% sedangkan sisanya 60% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam

			riset ini. Selanjutnya variabel intensif perpajakan dan lingkungan sosial secara simultan maupun parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
5	Ni Putu Desi Arya Dewi dan I Putu Gede Diatmika (2020)	Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Ditinjau dari hasil penelitian bahwa tingkat kepercayaan, persepsi tax amnesty, akuntabilitas layanan public, dan lingkungan sosial memberikan pengaruh secara positif dan signifikan Pada kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP 1 Pratama Tabanan-Bali. turut mendorong kepatuhan WP OP dalam memenuhi kewajibannya.
6	Eko Yudi Setiawan (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Blitar)	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variable Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil t hitung sebesar 6,615 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Sementara itu, Pelayanan Fiskus (X2) dengan t hitung sebesar 3,021 dengan signifikansi t sebesar 0,003 memiliki pengaruh positif

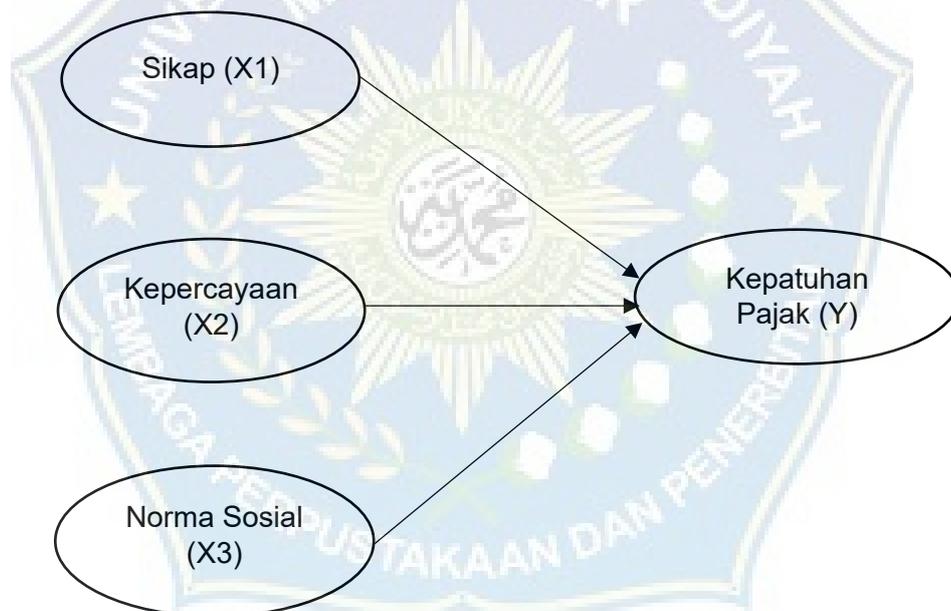
			dan signifikan. Sedangkan Sanksi Perpajakan (X3) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan dengan nilai t hitung sebesar - 0,950 dengan signifikasi t sebesar 0,344.
7	Mutiara Laraswati, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto (2017)	Pengaruh Pemahaman System E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem e-billing dan pelaksanaan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8	Fice Handayani, Bachtiar, dan Nur Khomariah (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Balikpapan.	Dari hasil penelitian didapatkan kesadaran wajib pajak dan modernisasi system administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Balikpapan. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

9	Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan pekerjaan Bebas di Kota Samarinda.	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Madjidain Un Rahma (2019)	Pengaruh Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib di DKI Jakarta.	Hasil analisis menunjukkan bahwa Transparansi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan Kepercayaan Wajib Pajak yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa dengan Transaksi Pajak dan

			Kepercayaan Wajib Pajak bersama-sama maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
--	--	--	--

### C. Kerangka Pikir

Berikut ini kerangka pikir yang diajukan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Sikap, Kepercayaan, dan Norma Sosial Wajib Pajak, dan untuk variabel dependennya yaitu Kepatuhan Pajak.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**

### D. Hipotesis

#### 1. Sikap Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak (H1)

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku

yang akan ditentukan. Jogiyanto (2007) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya. Hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan teori ekuitas (equity theory) (Salman dan Farid, 2008). Equity theory adalah gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil.

## **2. Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak (H2)**

Faktor yang digunakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Kepercayaan publik (Haning, et al, 2020). Kepercayaan publik merupakan variabel penting terwujudnya good government. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah. Dengan kata lain Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi dengan pelanggan.

Kepercayaan publik akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Fenomena lain terkait dengan Kepercayaan

publik yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus bidang perpajakan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk tidak patuh, wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

### **3. Norma Sosial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak (H3)**

Pada tataran sosial, norma akan dikaitkan dengan seberapa jauh penggelapan pajak di dalam suatu kelompok masyarakat, dianggap sebagai suatu prevalensi atau kelaziman (Kirchler dkk, 2008). Norma sosial terkait dengan perilaku dari kelompok, misalnya pasangan, orang kepercayaan, teman, kenalan, atau kelompok organisasi. Jika wajib pajak percaya bahwa kepatuhan pajak adalah perilaku yang tersebar luas dan disetujui dalam kelompok mereka, maka mereka cenderung untuk patuh juga. Menurut Ajzen (1991), norma sosial merupakan harapan seorang individu apabila satu orang atau beberapa orang disekelilingnya, seperti pasangan, saudara atau teman melakukan tindakan tertentu dan memotivasi tersebut untuk melakukan tindakan serupa.

Norma sosial dibentuk berlandaskan tekanan sosial dan pengaruh orang-orang yang dianggap penting di sekitar wajib pajak, contohnya keluarga, teman, petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Apabila orang-orang special atau yang dianggap penting oleh wajib pajak mempunyai sikap kooperatif dan positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut diduga akan patuh membayar pajak secara sukarela. Senada dengan penjelasan sebelumnya, penelitian

Alm dan Torgler (2012); Cahyonowati (2011); Gangl dkk (2015); Hidayat dan Nugroho (2010); Liu (2014) menunjukkan norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap suatu pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan asumsi atau prediksi yang dirumuskan oleh peneliti sebagai dasar untuk diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data.

Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis menggambarkan hubungan antara variabel atau memberikan prediksi tentang hasil dari suatu penelitian. Hipotesis digunakan sebagai dasar untuk merancang penelitian dan mengarahkan proses pengumpulan data serta analisis.

Hipotesis digunakan untuk menguji suatu asumsi atau teori dalam penelitian. Dengan merancang penelitian yang dapat menguji hipotesis-hipotesis ini, para peneliti dapat mengumpulkan bukti empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut, yang pada gilirannya dapat membantu dalam memperluas pemahaman kita tentang fenomena yang diteliti.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan *Explanatory Research*. Menurut Sugiyono (2017: 6), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yang difokuskan khusus untuk wajib pajak dengan KTP Makassar dan memiliki penghasilan serta terdaftar sebagai wajib pajak dan berstatus ASN dan Non ASN di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih 2 bulan yaitu bulan April-Mei 2024.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan ialah Jenis data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Sumber data yang akan digunakan ialah Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara menyurvei lapangan dan menggunakan

semua teknik pengumpulan data yang original (asli) atau memperoleh langsung dari sumber yang asli tanpa adanya perantara.

#### D. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian mengacu pada kelompok yang menjadi fokus dari studi atau penelitian tertentu. Ini bisa berupa kelompok orang, objek, atau fenomena yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang ingin diteliti atau dipahami oleh peneliti. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ber KTP makassar sebanyak 130.000 orang.

##### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian mengacu pada subset atau bagian dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diuji dalam suatu penelitian. Dalam banyak kasus, sulit atau tidak mungkin bagi peneliti untuk mengamati atau menguji seluruh populasi yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan untuk diuji. Sampel adalah komponen penting dalam desain penelitian, dan pemilihan sampel yang tepat memainkan peran kunci dalam keberhasilan penelitian dan interpretasi hasilnya. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan slovin.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{130.000}{1+(130.000).(0,01)^2}$$

$$n = 100$$

Dimana:

$n$  = Ukuran sampel yang dibutuhkan.

$N$  = Jumlah populasi.

$e$  = Margin of error (tingkat kesalahan yang diizinkan), biasanya dalam bentuk proporsi desimal (misalnya, jika margin of error adalah 5%,  $e$  akan menjadi 0.05).

## E. Metode Analisis Data

### 1. Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen pengukuran atau alat penelitian yang digunakan benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas adalah salah satu aspek penting dalam keandalan dan kredibilitas sebuah penelitian. Jika sebuah alat atau instrumen dianggap valid, maka dapat dianggap bahwa alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

Menurut Ghozali (2013) mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan kolerasi anatar skor butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ . Jika  $r$  hitung >  $r$  tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsiten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan coefficient cronbach alpha dengan batas toleransi 0,60 untuk data yang dapat dianggap reliabel.

## F. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.

### 2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antara variabel independen. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan regresi dependen variabel bebas yang terkandung dalam suatu model regresi yang sedang diuji. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 1.

### 3. Uji Heteroskedasitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang

dilakukan dengan meregresikan semua independen dari model regresi dengan nilai mutlak residualnya. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat masalah heterokedastisitas.

### G. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independen variabel terhadap variabel dependen dilakukan analisis data dengan menerapkan model statistik regresi linier berganda. Model statistik regresi berganda adalah model yang digunakan untuk memperoleh suatu persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan wajib pajak

a : Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> : Koefisien regresi

X<sub>1</sub> : Sikap

X<sub>2</sub> : Kepercayaan

X<sub>3</sub> : Norma Sosial

e : Random error

### H. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu asumsi tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Dalam konteks penelitian, uji hipotesis membantu peneliti untuk membuat kesimpulan tentang perbedaan, hubungan, atau efek dari variabel yang diteliti. Adapun tahapan uji hipotesis dilakukan sebagai berikut:

## 1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel independen pada model dapat menerangkan variabel dependen.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2006). Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 2. Uji Signifikansi t

Uji signifikansi t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

1. Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  dan koefisien regresi sesuai dengan yang di prediksi, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  dan koefisien regresi sesuai dengan yang di prediksi, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar

##### 1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Secara Geografis Kota Makassar terletak antara  $119^{\circ}24'17''38''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}8'6''19''$  Lintang Selatan, Luas Wilayah Kota Makassar tercatat  $175,77\text{km}^2$  yang meliputi 14 Kecamatan. Secara administrasi Kota Makassar berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Pemerintah wilayah administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Makassar, Kecamatan UjungPandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea, dengan jumlah Kelurahan sebanyak 142 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas  $48,22\text{ Km}^2$  atau  $27,43\%$  dari luasan Kota Makassar, sedangkan wilayah Kecamatan yang mempunyai luasan terkecil adalah Kecamatan Mariso yaitu  $1,82\text{ Km}^2$  atau  $1,04\%$  dari total wilayah Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat di table 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,431
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakukkang	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,11
<b>Jumlah</b>		<b>175,77</b>	<b>100,00</b>

(Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Makassar)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah mencapai 48,22 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Mariso dengan luas wilayah 1,82 Km<sup>2</sup>.

## 2. Aspek Kependudukan

Penduduk Kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistik yaitu 1.474.393 Jiwa yaitu terdiri atas 732.391 penduduk berjenis kelamin laki-laki serta 742.002 penduduk berjenis kelamin Perempuan, perkembangan penduduk di Kota Makassar sendiri mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 – 2020 dengan jumlah 1.526.667 jiwa menjadi 1.432.877 jiwa, tetapi mengalami kenaikan mulai dari tahun 2020 dengan jumlah 1.432.877 jiwa hingga pada tahun 2023 menjadi 1.474.393 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian table berikut:

**Tabel 4.2**

**Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mariso	60.499	57.426	57.594	57.795	58.730
2	Mamajang	61.452	56.049	56.056	56.094	58.293
3	Tamalate	205.541	180.824	181.533	182.348	188.432
4	Rappocini	170.121	144.587	144.619	144.733	150.613
5	Makassar	85.515	82.067	82.142	82.265	82.237
6	Ujung Pandang	29.054	24.526	24.526	24.541	24.851
7	Wajo	31.453	29.972	30.033	30.110	29.503
8	Bontoala	57.197	54.996	55.102	55.239	55.201
9	Ujung Tanah	35.534	35.789	35.947	36.127	36.745

10	Tallo	140.330	144.977	145.400	145.908	148.055
11	Panakuk kang	149.664	139.590	139.635	139.759	144.204
12	Manggala	149.487	146.724	147.549	148.462	160.466
13	Biringkanaya	220.456	209.048	210.076	211.228	215.820
14	Tamalanrea	115.843	103.177	103.220	103.322	106.262
<b>Jumlah</b>		<b>1.526.677</b>	<b>1.423.877</b>	<b>1.427.619</b>	<b>1.432.189</b>	<b>1.474.393</b>

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Pada tabel di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kota Makassar mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 tetapi kembali mengalami kenaikan dari tahun 2020-2023 dengan jumlah tertinggi tahun terakhir terdapat di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah 215.820 penduduk.

#### **B. Kepadatan Jumlah Penduduk**

Kepadatan penduduk di Kota Makassar terus mengalami perubahan pertumbuhan penduduk dan dalam penyebarannya, penduduk Kota Makassar tersebar secara tidak merata pada setiap kecamatan di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian table berikut.

**Tabel 4.3**

#### **Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk</b>
1	Mariso	1,82	58.730	32.269
2	Mamajang	2.25	58.293	25.908
3	Tamalate	20,21	188.432	9.324
4	Rappocini	9,23	150.613	16.318

5	Makassar	2,52	82.237	32.634
6	Ujung Pandang	2,63	24.851	9.449
7	Wajo	1,99	29.503	14.826
8	Bontoala	2,10	55.201	26.286
9	Ujung Tanah	5,94	36.745	8.351
10	Tallo	5,83	148.055	25.395
11	Panakuk kang	17,05	144.204	8.458
12	Manggala	24,14	160.466	6.647
13	Biringkanaya	48,22	215.820	4.476
14	Tamalanrea	31,84	106.262	3.337
<b>Jumlah</b>		<b>175,77</b>	<b>1.474.393</b>	<b>8.388</b>

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Pada tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Makassar memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 32.634 jiwa/km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 82.237 jiwa, sedangkan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Tamalanrea dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 3.337 jiwa/km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 106.262 jiwa.

### C. Deskriptif Responden

Responden dalam penelitian ini meliputi masyarakat umum yang merupakan wajib pajak orang pribadi dengan KTP Makassar dan memiliki penghasilan serta terdaftar sebagai wajib pajak dan berstatus ASN dan Non ASN di Kota Makassar. Responden yang menjadi objek dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Ini sesuai dengan metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu random sampling.

Berdasarkan data dari 100 orang responden diperoleh data berupa, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Pengelompokan ini dilakukan demi mendapatkan jawaban yang akurat mengenai gambaran responden dalam penelitian ini. Gambaran umum responden dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Kelamin
2. Usia
3. Pendidikan
4. Pekerjaan

#### 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dan Perempuan, yang merupakan wajib pajak di Kota Makassar, dimana jumlah wajib pajak laki-laki sebanyak 70 orang dan perempuan sebanyak 30 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**

#### **Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-laki	70	70%
Perempuan	30	30%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data primer yang diolah)

#### 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.5 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia.

**Tabel 4.5****Responden Berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
21-30 tahun	6	6%
31-40 tahun	55	55%
41-50 tahun	33	33%
>50 tahun	6	6%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data primer yang diolah)

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 55 orang atau 55%, sebanyak 6 orang atau 6% responden berusia 21-30 tahun, sebanyak 33 orang atau 33% responden berusia 41-50 tahun, dan sebanyak 6 orang atau 6% berusia diatas 50 tahun.

### 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.6 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan.

**Tabel 4.6****Responden Berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
SMA/SMK	0	0%
Diploma	5	5%
Sarjana	95	95%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

(Sumber : Data primer yang diolah)

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari lulusan Sarjana yaitu sebanyak 95 orang atau 95%, sebanyak 5 orang atau 5% responden berasal dari lulusan Diploma dan tidak ada yang berasal dari lulusan SMA/SMK.

#### 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.7 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pekerjaan.

**Tabel 4.7**  
**Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
ASN	50	50%
Karyawan Swasta	35	35%
Wiraswasta	14	14%
Pengajar	1	1%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

(sumber : Data primer yang diolah)

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan ASN yaitu sebanyak 50 orang atau 50%, sebanyak 35 orang atau 35% merupakan karyawan swasta, sebanyak 14 orang atau 14% merupakan wiraswasta, dan 1 orang atau 1% merupakan seorang pengajar.

#### D. Deskripsi Variabel Penelitian

Data yang diperoleh menggunakan skor mulai angka 1 sampai 5 yang dipakai untuk mengukur atau melihat tanggapan responden terhadap variabel sikap wajib pajak, kepercayaan wajib pajak, norma sosial wajib

Pajak, serta kepatuhan wajib pajak dimana tanggapan responden terhadap setiap variabel akan dimasukkan pada rentang interval kelas.

### 1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

Item-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.8**

**Tanggapan Responden terhadap Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)**

No	Pernyataan	Rata-rata Tanggapan Responden
1	X <sub>1,1</sub>	3,80
2	X <sub>1,2</sub>	3,75
3	X <sub>1,3</sub>	3,77
4	X <sub>1,4</sub>	3,79

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel sikap wajib pajak.

### 2. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepercayaan Wajib Pajak (X2)

Item-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.9**

**Tanggapan Responden terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (X2)**

No	Pernyataan	Rata-rata Tanggapan Responden
1	$X_{2.1}$	3,80
2	$X_{2.2}$	3,88
3	$X_{2.3}$	3,75
4	$X_{2.4}$	3,80
5	$X_{2.5}$	3,75

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kepercayaan wajib pajak.

### 3. Tanggapan Responden terhadap Variabel Norma Sosial (X3)

Item-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.10**

#### Tanggapan Responden terhadap Variabel Norma Sosial (X3)

No	Pernyataan	Rata-rata Tanggapan Responden
1	$X_{3.1}$	3,80
2	$X_{3.2}$	3,77
3	$X_{3.3}$	3,70
4	$X_{3.4}$	3,77

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel norma sosial.

### 4. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Item-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.11**

**Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Pajak (Y)**

No	Pernyataan	Rata-rata Tanggapan Responden
1	Y <sub>.1</sub>	3,89
2	Y <sub>.2</sub>	3,74
3	Y <sub>.3</sub>	3,79
4	Y <sub>.4</sub>	3,69

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan pajak.

## E. Hasil Analisis Data

### 1. Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen pengukuran atau alat penelitian yang digunakan benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas adalah salah satu aspek penting dalam keandalan dan kredibilitas sebuah penelitian. Jika sebuah alat atau instrumen dianggap valid, maka dapat dianggap bahwa alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

Menurut Ghozali (2013) mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan kolerasi anatar skor butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom

(df) = n-2. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Pearson Correlation</b>	<b>r table</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Sikap wajib pajak (X1)</b>	X <sub>1.1</sub>	0,865	0,197	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,845	0,197	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,828	0,197	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,835	0,197	Valid
<b>Kepercayaan wajib pajak (X2)</b>	X <sub>2.1</sub>	0,895	0,197	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,910	0,197	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,912	0,197	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,870	0,197	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0,840	0,197	Valid
<b>Norma sosial (X3)</b>	X <sub>3.1</sub>	0,890	0,197	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,820	0,197	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,855	0,197	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,807	0,197	Valid
<b>Kepatuhan Pajak (Y)</b>	Y <sub>.1</sub>	0,985	0,197	Valid
	Y <sub>.2</sub>	0,980	0,197	Valid
	Y <sub>.3</sub>	0,987	0,197	Valid
	Y <sub>.4</sub>	0,790	0,197	Valid

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.12 di atas, terlihat bahwa semua pernyataan yang mengukur variabel sikap wajib pajak, kepercayaan wajib pajak, norma sosial, dan kepatuhan pajak, keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai kolerasi  $> r$  tabel sebesar 0,197.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsiten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan coefficient cronbach alpha dengan batas toleransi 0,60 untuk data yang dapat dianggap reliabel. Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Sikap wajib pajak (X1)	0,890	Reliabel
Kepercayaan wajib pajak (X2)	0,950	Reliabel
Norma Sosial (X3)	0,879	Reliabel
Kepatuhan pajak (Y)	0,869	Reliabel

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai coefficient cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

## F. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari tabel 4.14.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Normalitas**

	<b>Unstandardized Residual</b>	<b>Keterangan</b>
Kolmogorov-Smirnov	1,072	Normal
Asymp. Signifikansi	0,210	

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,210, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

## 2. Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antara variabel independen. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan regresi dependen variabel bebas yang terkandung dalam suatu model regresi yang sedang diuji. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* 1.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sikap wajib pajak (X1)	0,493	2,055	Non Multikolinieritas

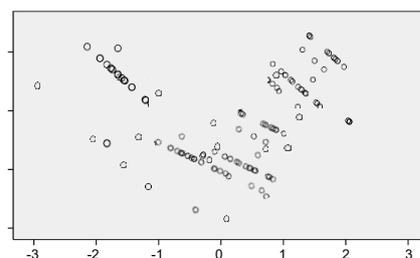
Kepercayaan wajib pajak(X2)	0,440	2,335	Non Multikolinearitas
Norma sosial (X3)	0,350	2,795	Non Multikolinearitas

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka dari itu hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel independent atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independent (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang dilakukan dengan meregresikan semua independen dari model regresi dengan nilai mutlak residualnya. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat masalah heterokedastisitas.



**Gambar 4.1 Gambar Scatterplot**

Berdasarkan gambar 4.1 grafik *scatterplot* di atas menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Maka, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi. Setelah dilakukan uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan melalui uji t yang akan dilakukan tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

#### G. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independen variabel terhadap variabel dependen dilakukan analisis data dengan menerapkan model statistik regresi linier berganda. Model statistik regresi berganda adalah model yang digunakan untuk memperoleh suatu persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil yang diperoleh ialah sebagai berikut :

**Tabel 4.16**

#### Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized	t	Sig.
	Coefficients		
	B		
Konstanta	-0,609	-	-
Sikap wajib pajak (X1)	0,230	2,975	0,007

Kepercayaan wajib pajak (X2)	0,250	3,050	0,005
Norma sosial (X3)	0,670	7,118	0,000

(Sumber : Data primer yang diolah)

$$Y = -0,609 + 0,230X_1 + 0,250X_2 + 0,670X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. b1 (nilai koefisien regresi sikap wajib pajak) bernilai positif, yang dimana berarti apabila sikap wajib pajak semakin meningkat, maka kepatuhan pajak yang dihasilkan akan semakin meningkat.
2. b2 (nilai koefisien regresi kepercayaan wajib pajak) bernilai positif, yang dimana berarti apabila kepercayaan wajib pajak semakin meningkat, maka kepatuhan pajak yang dihasilkan akan semakin meningkat.
3. b3 (nilai koefisien regresi norma sosial) bernilai positif, yang dimana berarti apabila norma sosial semakin meningkat, maka kepatuhan pajak yang dihasilkan akan semakin meningkat.

## H. Uji Hipotesis

### 1. Uji koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel independen pada model dapat menerangkan variabel dependen.

**Tabel 4.17**

### **Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

R	R Square
0,891	0,777

(Sumber : Data primer yang diolah)

Hasil uji koefisiensi determinasi dan koefisien kolerasi berganda menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,891. Hal ini berarti hubungan atau kolerasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kuat karena  $> 0,50$ . Nilai *R Square* sebesar 0,777 atau 77,7%, keadaan ini menunjukkan bahwa variabel Independen yaitu sikap, kepercayaan, dan norma sosial wajib pajak sebesar 78,9% terhadap tingkat variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan sisanya 22,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

## 2. Uji Statistik t (Parsial)

Uji signifikansi t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

**Tabel 4.19**

### Hasil Uji t (Parsial)

Model	T	Sig.
Konstanta	-	-
Sikap wajib pajak (X1)	2,975	0,007
Kepercayaan wajib pajak (X2)	3,050	0,005
Norma Sosial (X3)	7,118	0,000

(Sumber : Data primer yang diolah)

1. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.19, pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk sikap wajib pajak adalah  $\alpha = 0,007 < 0,05$  hal ini menandakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN. Sehingga H1 yang dinyatakan dugaan adanya pengaruh dapat diterima.
2. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.19, pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk kepercayaan wajib pajak adalah  $\alpha = 0,005 < 0,05$  hal ini menandakan bahwa kepercayaan wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN. Sehingga H2 yang dinyatakan dugaan adanya pengaruh dapat diterima.
3. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.19, pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk norma sosial adalah  $\alpha = 0,000 < 0,05$  hal ini menandakan bahwa norma sosial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN. Sehingga H3 yang dinyatakan dugaan adanya pengaruh dapat diterima.

## I. Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menguji tentang pengaruh sikap, kepercayaan, dan norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

### 1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$ . Sehingga hal ini dinyatakan bahwa variabel sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Layli Yobapritika Putri (2014) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Jogiyanto (2007) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya

### 2. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah ataupun otoritas pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ . Sehingga hal ini dinyatakan bahwa variabel kepercayaan wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ni Putu Desi Arya Dewi dan I Putu Gede Diatmika (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang digunakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Kepercayaan publik (Haning, et al, 2020). Kepercayaan publik merupakan variabel penting terwujudnya good government. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah.

### 3. Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak

Norma sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $0.000 < 0,05$ . Sehingga hal ini dinyatakan bahwa variabel norma sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yosep Harry Kristian Silaen (2024) dan Mila Ismi Nofenlis (2022) yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Norma sosial dibentuk berlandaskan tekanan sosial dan pengaruh orang-orang yang dianggap penting di sekitar wajib pajak, contohnya keluarga, teman, petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Apabila

orang-orang special atau yang dianggap penting oleh wajib pajak mempunyai sikap kooperatif dan positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut diduga akan patuh membayar pajak secara sukarela.

Berdasarkan teori TPB dari Icek Ajzen (1988), yang menyatakan bahwa individu mempertimbangkan kontrol berperilaku yaitu kemampuan mereka untuk mengambil keputusan terhadap tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan-urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu dicerminkan dalam tingkah laku, dimana menurut Icek Ajzen seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara individu akan bertindak laku dalam suatu keadaan atau situasi. Hal ini pun bisa dikaitkan dengan hasil penelitian ini bahwa berpengaruhnya sikap, kepercayaan, dan norma sosial terhadap kepatuhan pajak dikarenakan timbulnya keyakinan dan intensi perilaku wajib pajak serta adanya keputusan wajib pajak dalam bertindak laku terhadap kepatuhan pajak. Berpengaruhnya sikap, kepercayaan, dan norma sosial terhadap kepatuhan pajak ialah karena wajib pajak memiliki niat atau keinginan untuk melakukan kepatuhan pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan dapat

1. Berdasarkan dari hasil uji t, dapat kita ketahui bahwa variabel sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Berdasarkan hasil uji t, dapat kita ketahui bahwa variabel kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Berdasarkan hasil uji t, dapat kita ketahui bahwa variabel norma sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

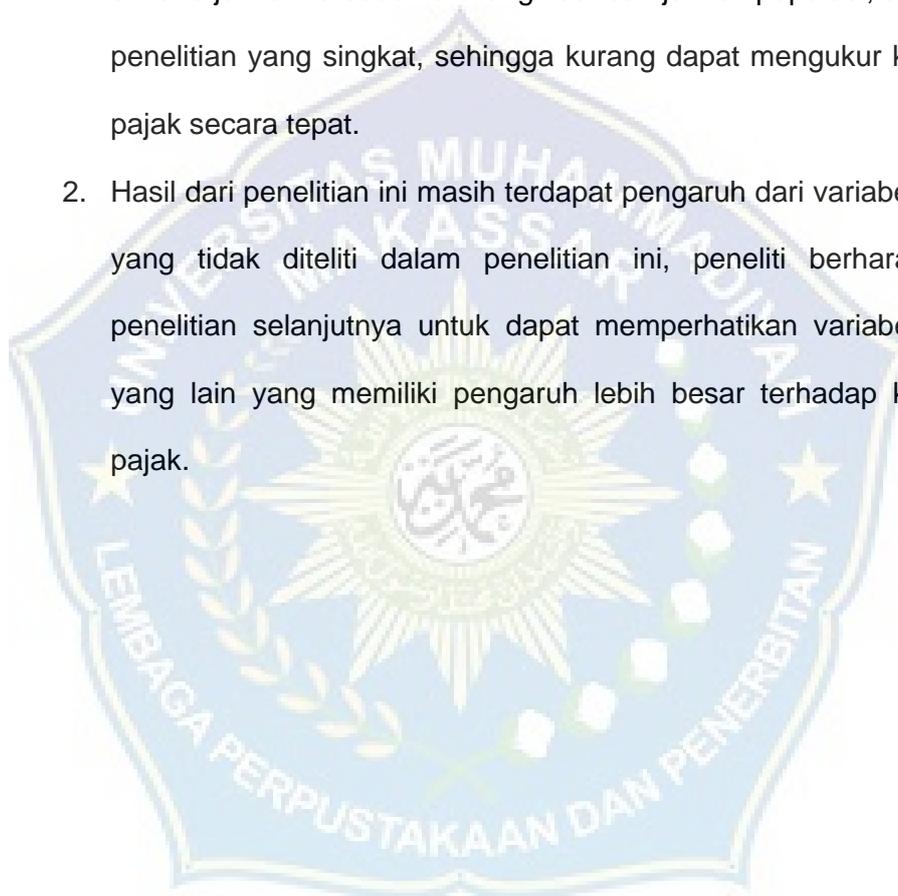
#### **B. Saran**

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya seperti pemahaman-pemahaman pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti hasil uji koefisien determinasi dimana pengaruh sebesar 21,3% dari variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

### C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sampel yang diambil hanya berjumlah 100 orang wajib pajak. Yang dimana jumlah tersebut terbilang kecil dari jumlah populasi, serta waktu penelitian yang singkat, sehingga kurang dapat mengukur kepatuhan pajak secara tepat.
2. Hasil dari penelitian ini masih terdapat pengaruh dari variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini, peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya untuk dapat memperhatikan variabel-variabel yang lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alshira'h, Ahmad Farhan, Moh'd Alsqour, Abdalwali Lutfi, Adi Alsyouf And Malek Alshirah. 2020. *A Sosio-Economic Model Of Sales Tax Compliance*. Irbid National university. (Vol. 8 No. 88)
- Arya Dewi, Ni Putu Desi Dan I Putu Gede Diatmika. 2020. *Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Pendidikan Ganesha. (Vol. 10 No. 2 Hal. 245-254)
- Aspexsia, A. P., Halim, A., & Rini, A. M. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Accounting dan Business Information System Journal*, 7(1)
- Augustine, A. A., & Enyi, E. (2020). *Control of Corruption, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance in Southwest, Nigeria*. *Management Studies*, 8(1), 84-97.
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsi, dan Agus Iwan K.(2017), Pengaruh Kesadarn Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda.
- Dewi, N. P. D. A., & Supadmi, N.L. (2019). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245.
- Faizal, S.M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. 2017. *Perception on Justice, Trust, and Tax Compliance Behavior in Malaysia*. *Kasetsart Journal of Social Sciences*. (Vol. 38 No. 3 Hal. 226-232)
- Fauziati, Popi, Nailal Husna Dan Yetty Morelent. 2022. *Dampak Insentif Perpajakan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta. (Vol. 6 No. 2)
- Hassan, Ibn.E, Ahmed Naeem And Sidra Gulzar. 2021. *Voluntary Tax Compliance Behavior Of Individual Taxpayers in Pakistan*. *Financial Innovation*. (Vol. 7 No. 21)
- Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. 2017. *Tax Compliance Across Sociodemographic Categories: Meta-analyses of Survey Studies in 111 Countries*. *Journal of Economic Psychology*. (Vol. 62 Hal. 63-71)
- Herman, Lisa Amelia, Aminar Sutra Dewi Dan Mike Kusuma Dewi. 2019. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan, Dan Norma Sosial*. *Sekolah Tinggi Ekonomi KBP Padang*. (Vol. 4 No. 1 Hal. 146-161)

- Khalid, Tareq Bani, Ahmad Farhan Alshira'h And Malek Hamed Alshirah. 2022. *Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior*. Al al-Bayt University. (Vol. 10 No. 30)
- Kirana, Atia, Dan Ulfa Rabiyyah. 2022. *Pengaruh Nilai Budaya Lokal, Nilai Sosial, Dan Locus of Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Selatan*. AkMen (Vo. 19 No. 3)
- Latief, S., Junaidin Z., & Mapparenta. 2020. *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Center of Economic Student Journal. (Vol. 3 No. 3 Hal. 270-289)
- Ma, Siti, And A. Luthfi Hamidi. 2022. *The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables*. (Vol. 5 No. 4)
- Nabila, Zahra Durah Dan Dra. Isroah, M.Si. 2019. *Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pengusaha*. Universitas Negeri Yogyakarta. (Vol. 8 No. 1)
- Nasution, Mustafa Kemal, Fitri Santi, Husaini, Fadli And Kashan Pirzada. 2020. *Determinants Of Tax Compliance: A Study On Individual Taxpayers In Indonesia*. Entrepreneurship And Sustainability Issues. (Vol. 8 No. 2)
- Rahma, Madjidainun (2019), *Pengaruh Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Ada di Wilayah DKI Jakarta*.
- Susilawati, Ika Rahma Dan Rahmat Hidayat. 2019. *Representasi Sosial Tentang Pajak Pada Aparatur Sipil Negara*. Universitas Brawijaya Malang. (Vol.17 No.2)
- Susyanti, Jeni Dan Sunardi. 2023. *Investigations of Readiness Tax Compliance Dynamics: Studies on MSME of Creative Economics Actors in Indonesia*. Islam University of Malang. (Vol. 23 No. 194)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia edisi 12*, Jakarta: Salemba Empat.
- <https://www.online-pajak.com/perkembangan-umkm-di-indonesia>
- <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>
- <https://www.linovhr.com/manfaat-pajak/>
- [https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/bank\\_data/](https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/bank_data/)



**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1**  
**KUESIONER PENELITIAN**

1. Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak (X1)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5

pilihan jawaban di antara lain :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara					
3	Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara					
3	Saya membayar pajak karena Kasadaran diri saya sendiri					
4	Menyembunyikan pendapatan dari membayar pajak adalah tindakan yang tidak bermoral					

2. Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak (X2)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5

pilihan jawaban di antara lain :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral

4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya bahwa pajak digunakan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan					
2	Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana					
3	Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan, dan tanggung jawab					
4	Saya percaya bahwa pajak yang saya sudah bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat					
5	Saya yakin bahwa petugas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik.					

### 3. Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak (X3)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5 pilihan jawaban di antara lain :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Teman-teman dan rekan kerja di lingkungan saya mendorong saya untuk mematuhi kewajiban perpajakan					

2	Petugas pajak memberi saya saran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak					
3	Keluarga dan lingkungan disekitar saya menyarankan dan mendorong saya untuk memenuhi kewajiban pajak					
4	Informasi yang beredar di sosial media memengaruhi saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan					

#### 4. Kepatuhan Pajak (Y)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5 pilihan jawaban di antara lain :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

NO	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
2	Selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
3	Menghitung pajak dengan jumlah yang benar					
4	Selalu membayar pajak dengan tepat waktu					

**LAMPIRAN 2**  
**SURAT IZIN PENELITIAN**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 10959/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4216/05/C.4-VIII/V/1445/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURUL IZZAH  
Nomor Pokok : 105731119922  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" REPRESENTASI SOSIAL-BUDAYA TENTANG KEPATUHAN PAJAK PADA ASN DAN NON ASN  
DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Mei s/d 10 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 06 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
2. *Pertinggal.*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4216/05/C.4-VIII/V/1445/2024

06 May 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

27 Syawal 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 308/05/A.2-II/V/45/2024 tanggal 6 Mei 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURUL IZZAH

No. Stambuk : 10573 1119922

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"REPRESENTASI SOSIAL-BUDAYA TENTANG KEPATUHAN PAJAK PADA ASN DAN NON ASN DI KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Mei 2024 s/d 10 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Mu. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 070/2193/SKP/SB/DPMP/TS/3/2024

#### **DASAR:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023.
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10959/S.01/PTSP/2024, Tanggal 06 Mei 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2212/SKP/SB/BKBP/5/2024

#### **Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**

Nama	: NURUL IZZAH
NIM / Jurusan	: 105731119922 / Akuntansi
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampa-
Waktu Penelitian	: 10 Mei 2024 - 10 Juni 2024
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: REPRESENTASI SOSIAL-BUDAYA TENTANG KEPATUHAN PAJAK PADA ASN DAN NON ASN DI KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangkesosbudkeshangsopolmks@gmail.com](mailto:bidangkesosbudkeshangsopolmks@gmail.com).
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-05-14 09:26:21



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA MAKASSAR

HELMI BUDIMAN, S.STP, M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal-

**LAMPIRAN 3**  
**HASIL PLAGIASI**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurul Izzah  
Nim : 105731119922  
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyah S. H. M. I.P.  
NBM 594 59

## BAB I

AB I Nurul Izzah - 105731119922

ORIGINALITY REPORT

**100%** LULUS

10% SIMILARITY INDEX

5% INTERNET SOURCES

% PUBLICATIONS

% STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## BAB II

AB II Nurul Izzah - 105731119922

ORIGINALITY REPORT

**24%** **LULUS** **24%** **10%** **%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

turnitin

## PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
2	journals.synthesispublication.org Internet Source	2%
3	journal.stieamkop.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
5	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.poltekba.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.uwp.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
9	jps.ui.ac.id Internet Source	1%

	<a href="http://journal.ubpkarawang.ac.id">journal.ubpkarawang.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://www.online-pajak.com">www.online-pajak.com</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
19	<a href="http://eprint.stieww.ac.id">eprint.stieww.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On      Exclude matches  On

Exclude bibliography  On

## BAB III

AB III Nurul Izzah - 105731119922



BAB IV

AS IV Nurul Izzah - 105731119922

**LULUS**

9%	10%	7%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

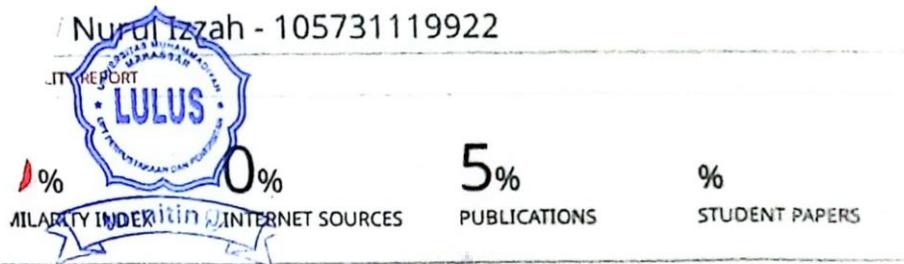
INTERNET SOURCES

1	repo.stiemuhcilacap.ac.id	3%
2	eprints.ahmaddahlan.ac.id	2%
3	repo.itsm.ac.id	2%
4	jurnal.puncabudi.ac.id	2%



## BAB V

Nurul Izzah - 105731119922



PRIMARY SOURCES

- 1 Vania Annissa Holle, Agustinus Salle, Mariolin Sanggenafa. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020 5%
- Publication

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography

## LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL X3	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	TOTAL Y	Y	
1	3	3	3	4	13	3.25	3	3	4	3	17	3.4	3	4	4	14	3.5	3	4	4	15	3.75	
2	4	3	3	3	13	3.25	4	4	4	4	20	4	3	3	3	12	3	3	4	4	15	3.25	
3	4	4	4	4	16	4	3	3	4	3	17	3.4	3	4	3	13	3.25	3	4	4	4	15	3.75
4	4	3	3	4	14	3.5	4	4	3	4	19	3.6	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	
5	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	3	3	3	4	13	3.25	3	3	3	3	12	3
6	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	13	3.25	3	4	4	4	15	3.75
7	2	3	2	3	10	2.5	3	3	2	3	11	2.6	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
8	3	3	4	3	13	3.25	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	2	2	2	2	8	2
9	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19	3.8	3	4	4	14	3.5	3	4	4	4	15	3.75
10	3	4	3	2	12	3	4	5	5	5	24	4.8	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
11	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	14	3.5	4	3	3	3	15	3.25
12	3	3	3	3	12	3	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	3	2	2	3	10	2.5
13	2	3	2	2	9	2.25	4	4	3	4	19	3.6	2	3	2	9	2.25	2	2	2	2	8	2
14	4	4	4	4	16	4	4	5	4	5	24	4.8	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
15	3	4	4	4	15	3.75	4	5	5	5	24	4.8	2	3	4	13	3.25	4	3	3	4	14	3.5
16	4	3	3	3	13	3.25	4	5	5	5	24	4.8	2	3	4	13	3.25	3	3	3	3	12	3
17	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	15	3	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
18	3	3	4	4	14	3.5	3	3	4	3	17	3.4	4	3	4	15	3.75	3	3	3	3	12	3
19	3	4	3	2	12	3.25	4	4	3	4	19	3.6	3	4	4	14	3.5	3	4	4	4	15	3.75
20	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	
21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
22	4	4	4	4	16	4	3	3	2	3	15	2.6	4	3	3	12	3	3	3	3	12	3	
23	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	15	3	2	4	5	14	3.5	3	4	4	4	15	3.75
24	3	4	3	2	12	3	3	4	4	4	19	3.8	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	
25	4	4	4	4	16	4	4	5	5	5	24	4.8	4	4	4	16	4	3	4	4	4	15	3.75
26	4	5	4	4	17	4.25	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
27	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
28	4	5	4	4	17	4.25	4	2	3	4	19	3.6	4	5	4	18	4.5	4	5	5	5	19	4.75
29	4	4	4	4	16	4	4	5	4	5	22	4.4	4	4	4	16	4	5	5	5	5	19	4.75
30	5	4	4	5	19	4.5	4	5	5	5	24	4.8	4	5	4	19	4.5	4	5	5	5	19	4.75
31	5	5	5	5	20	5	4	5	5	5	24	4.8	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	
32	3	4	3	4	14	3.5	3	3	3	3	15	3	4	3	4	14	3.5	3	3	3	3	12	3
33	4	5	4	3	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
34	4	5	4	4	17	4.25	4	5	4	5	22	4.4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	
35	4	5	4	5	18	4.5	4	4	5	4	22	4.4	4	5	4	18	4.5	4	5	5	5	19	4.75
36	5	5	4	4	18	4.5	5	5	5	5	23	4.6	5	4	4	17	4.25	4	4	4	4	16	4



## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis Nurul Izzah, tempat dan tanggal lahir di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 November 2000. Penulis merupakan anak dari Ayahanda Hasdi Hasan dan Ibunda Nikmah Razak sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dan sekaligus sebagai anak kembar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Aisyiyah ABA II pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007. Setelah tamat TK, penulis melanjutkan pendidikan di SD Muhammadiyah Perumnas pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Unismuh Makassar dan lulus pada tahun 2016. Kemudian ditahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar dan lulus pada tahun 2019. Penulis pun melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis menyelesaikan studi D-III pada tahun 2022 dan pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan studi S1 di Universitas dan Fakultas yang sama dengan mengambil jurusan Akuntansi. Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran dan umur yang panjang sampai saat ini sehingga penulis dapat melewati masa-masa tersulit dihidup. Harapan penulis semoga ilmu yang didapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun masyarakat luas dan tujuan penulis yang paling penting dari perjalanan selama ini adalah untuk membahagiakan kedua orang tua, dan saudara-saudara serta keluarga besar penulis.